

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) BANGKA TENGAH
DALAM SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN
2024 (STUDI KASUS PULAU NANGKA)**

Siti Sara

Universita Bangka Belitung
Email: Sitisara1123@gmail.com

Novendra Hidayat

Universitas Bangka Belitung
Email: novendra@ubb.ac.id

Irvan Ansyari

Universita Bangka Belitung
Email: irvan@ubb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangka Tengah dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Pulau Nangka”, sebuah daerah terpencil dengan keterbatasan akses informasi. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat akibat frekuensi sosialisasi yang terbatas, saluran komunikasi yang kurang inklusif, serta hambatan geografis dan sosial budaya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas peran KPU dalam sosialisasi Pilkada serta mengkaji hambatan dan faktor pendukungnya dengan menggunakan perspektif teori difusi inovasi Rogers (1961). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Bangka Tengah telah melaksanakan sosialisasi dengan berbagai metode, antara lain tatap muka *door-to-door*, penggunaan alat peraga, dan media sosial, yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan antusiasme masyarakat. Namun, keberhasilan tersebut terkendala oleh frekuensi sosialisasi yang minimal, keterbatasan saluran komunikasi yang menjangkau semua lapisan masyarakat, serta koordinasi yang belum optimal antar pihak penyelenggara pemilu dan tokoh lokal. Faktor-faktor ini menyebabkan proses difusi inovasi dalam sosialisasi Pilkada belum berjalan secara maksimal sesuai tahapan pengetahuan, persuasi, dan keputusan. Kesimpulannya, meskipun peran KPU sudah cukup baik dalam menjalankan sosialisasi, diperlukan peningkatan frekuensi, kontinuitas, dan inklusivitas metode komunikasi agar masyarakat di daerah terpencil seperti Pulau Nangka dapat memahami dan berpartisipasi secara aktif dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pendekatan yang mengintegrasikan berbagai media komunikasi dan penguatan sinergi dengan agen perubahan lokal menjadi kunci keberhasilan sosialisasi pilkada yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, Sosialisasi, Pilkada Serentak

Abstract

On Nangka Island, a rural location with little access to information, this study looks at the Central Bangka Regional General Election Commission's (KPUD) function in promoting the simultaneous regional head elections in 2024. Geographical and sociocultural limitations, less inclusive communication methods, and low public awareness and participation as a result of infrequent outreach are the primary issues noted. By applying Rogers' (1961) diffusion of innovation theory perspective, this study aims to assess the success of the KPU's role in promoting the regional elections as well as the challenges and enabling variables. The study employed a qualitative methodology, gathering data via in-person field observations and interviews. The findings of the study demonstrated that the Central Bangka Election Commission (KPU) has successfully raised public knowledge and enthusiasm through the use of socialization techniques such as door-to-door meetings, props, and social media. The low frequency of socialization, the lack of effective lines of information that reach all societal levels, and the poor coordination between local leaders and election organizers, however, hinder this success. According to the stages of knowledge, persuasion, and decision-making, these issues have caused the invention diffusion process in the Pilkada socialization to not function as best it should. In summary, even though the General Elections Commission (KPU) has done a good job of reaching out to the public, more frequent, continuous, and inclusive communication methods are required to make sure that people in isolated places like Nangka Island are aware of and take part in the regional head elections. The secret to successful and long-lasting election outreach is a strategy that incorporates a variety of communication channels and builds partnerships with regional change agents.

Keywords: *Function, Dissemination, Simultaneous Regional Elections*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat. Pilkada memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah serta menegakkan kedaulatan rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E. Penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, dan transparan menjadi prasyarat penting agar legitimasi pemerintah daerah dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memegang peran sentral dalam mengawal seluruh tahapan Pilkada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

i Indonesia, sistem demokrasi memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, khususnya melalui hak pilih mereka dalam Pilkada.

Namun, kesadaran politik dan partisipasi masyarakat tidak terbentuk secara otomatis. Sosialisasi dan pendidikan politik yang efektif menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa setiap warga negara memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menggunakan hak pilihnya secara rasional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, KPUD dituntut untuk melaksanakan sosialisasi yang inklusif, sistematis, dan berkelanjutan guna mendorong tingkat partisipasi politik pemilih yang tinggi serta membangun budaya demokrasi yang sehat.

Pulau Nangka sebagai daerah terpencil di Kabupaten Bangka Tengah menghadapi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sosialisasi Pilkada. Kondisi geografis yang sulit diakses, keterbatasan infrastruktur komunikasi, dan variabel sosial budaya masyarakat menjadi hambatan utama dalam penyebaran informasi Pilkada. Ketidakmerataan akses informasi ini berpotensi menurunkan partisipasi politik masyarakat serta membawa dampak negatif terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana KPUD Bangka Tengah menjalankan fungsi sosialisasi di Pulau Nangka sangat penting sebagai upaya mendukung demokrasi yang merata, terutama di daerah-daerah terpencil.

Beberapa regulasi yang mengatur tugas dan wewenang KPUD dalam melaksanakan sosialisasi pemilu telah ditetapkan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017. Kedua peraturan ini menegaskan bahwa sosialisasi tidak hanya bertujuan menyebarkan informasi teknis Pilkada, tetapi juga mendidik pemilih agar mampu berpartisipasi secara aktif, kritis, dan rasional dalam proses pemilihan. Selain itu, sosialisasi juga harus menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan pendekatan yang adaptif sesuai kondisi lokal, sehingga partisipasi dapat merata dan inklusif.

Teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Rogers (1961) menjadi paradigma yang relevan untuk menganalisis bagaimana inovasi komunikasi politik dan sosialisasi Pilkada dapat diadopsi oleh masyarakat Pulau Nangka. Proses difusi yang melibatkan tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik saluran komunikasi serta agen perubahan lokal. Oleh karena itu, penting bagi KPUD untuk memanfaatkan beragam media komunikasi dan menggandeng tokoh masyarakat, perangkat desa, serta lembaga terkait dalam menyukseskan sosialisasi Pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran KPUD Bangka Tengah dalam menjalankan sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 di Pulau Nangka. Studi

ini juga akan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta faktor pendukung yang dapat memaksimalkan peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di daerah terpencil. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi empiris untuk pengembangan strategi sosialisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait peran KPUD Bangka Tengah dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2024 di daerah terpencil Pulau Nangka. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif tentang proses, pengalaman, masalah, dan strategi yang digunakan oleh KPUD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta respon masyarakat terhadap sosialisasi tersebut.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Pulau Nangka, Kabupaten Bangka Tengah, yang merupakan wilayah terpencil dengan karakteristik geografis dan sosial budaya khusus yang mempengaruhi proses sosialisasi.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok dengan peran kunci dalam proses sosialisasi Pilkada, yaitu:

- Anggota dan staf KPUD Bangka Tengah yang bertanggung jawab atas kegiatan sosialisasi.
- Perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan lokal.
- Masyarakat umum di Pulau Nangka sebagai sasaran sosialisasi dan pemilih Pilkada.
- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga terlibat dalam pengawasan dan edukasi masyarakat.

Prosedur

Proses penelitian diawali dengan identifikasi lokasi dan pelaku utama dalam sosialisasi Pilkada. Peneliti melakukan kontak awal dengan KPUD untuk memperoleh izin dan data administrasi. Selanjutnya dilakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat pelaksanaan sosialisasi, diikuti dengan wawancara mendalam dengan berbagai informan

untuk menggali pandangan, pengalaman, dan hambatan dalam sosialisasi. Data sekunder juga dikumpulkan dari dokumen resmi, regulasi, dan laporan terkait sosialisasi Pilkada.

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data

Data yang dikumpulkan dibedakan menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif secara langsung di lapangan terhadap aktivitas sosialisasi, serta laporan atau catatan kegiatan KPUD. Data sekunder berasal dari dokumentasi, seperti peraturan KPU, bahan sosialisasi, laporan sebelumnya, statistik partisipasi pemilih, dan literatur terkait.

Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang digunakan secara komplementer untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai pelaksanaan sosialisasi Pilkada oleh KPUD Bangka Tengah di Pulau Nangka. wawancara merupakan teknik utama untuk menggali informasi mendalam dari informan yang memiliki peran dan pengalaman relevan terkait proses sosialisasi Pilkada. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, artinya peneliti menggunakan daftar pertanyaan terbuka yang fleksibel sehingga memungkinkan pengembangan topik secara spontan sesuai alur pembicaraan. Metode ini memberi keleluasaan bagi informan untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, kendala, dan saran secara terbuka serta mendalam. Observasi dilakukan secara partisipatif di mana peneliti hadir langsung dalam situasi pelaksanaan sosialisasi di lapangan. Melalui observasi, peneliti mengamati bagaimana sosialisasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, metode yang digunakan, interaksi antara penyelenggara dan masyarakat, serta reaksi dan respons masyarakat terhadap sosialisasi. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung dan pelengkap untuk menguatkan data primer dari wawancara dan observasi. Jenis dokumentasi yang dikumpulkan meliputi dokumen resmi KPUD seperti regulasi terkait Pilkada dan sosialisasi, laporan kegiatan sosialisasi, bahan-bahan kampanye atau edukasi, serta statistik partisipasi pemilih.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan :

Reduksi data

Proses reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis yang bertujuan untuk menyederhanakan, memfokuskan, dan mengelompokkan data mentah menjadi bagian-bagian yang lebih terorganisir dan bermakna. Reduksi dilakukan dengan cara memilah data yang relevan dengan tujuan penelitian, menghilangkan data yang tidak penting atau berulang, serta mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau kategori yang muncul dari data lapangan. Dalam penelitian ini, contoh reduksi data adalah mengkategorikan pernyataan dan observasi tentang metode sosialisasi, hambatan yang ditemukan, respon masyarakat, dan strategi komunikasi yang digunakan oleh KPUD. Reduksi juga meliputi proses pengkodean data, yaitu memberikan label pada teks wawancara dan catatan observasi untuk memudahkan pencarian pola dan hubungan antar data. Proses reduksi berlangsung secara berkelanjutan selama pengumpulan data hingga seluruh data siap dianalisis secara mendalam.

Display Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian atau display data yang bertujuan untuk menyusun dan memvisualisasikan data secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami konteks dan pola yang muncul. Penyajian data ini bisa berbentuk narasi deskriptif, tabel ringkasan, diagram alur, atau matriks yang menggambarkan keterkaitan antar variabel. Dalam konteks penelitian ini, data disajikan dengan mendeskripsikan berbagai aktivitas sosialisasi, metode komunikasi, dan tantangan di lapangan, disertai dengan kutipan langsung dari informan untuk menguatkan temuan. Display data juga bisa mengorganisasi informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menunjukkan sinkronisasi atau perbedaan informasi yang diperoleh.

Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan proses sintesis dari seluruh data yang sudah direduksi dan disajikan. Peneliti melakukan interpretasi mendalam untuk mengidentifikasi makna utama dari temuan sesuai dengan kerangka teori dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan bukti kuat yang diperoleh dari data lapangan dan menjawab masalah penelitian secara sistematis. Dalam penelitian sosialisasi Pilkada, penarikan kesimpulan mencakup evaluasi efektivitas metode sosialisasi, hambatan yang mengganggu proses difusi informasi, dan rekomendasi strategi perbaikan yang dapat dilakukan oleh KPUD. Kesimpulan

juga mempertimbangkan keterbatasan penelitian dan relevansi hasil dengan teori difusi inovasi Rogers serta literatur terkait demokrasi dan partisipasi politik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian KPUD Bangka Tengah melaksanakan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Pulau Nangka dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan masyarakat. Metode utama yang digunakan meliputi komunikasi tatap muka door-to-door, penggunaan media alat peraga seperti baliho, spanduk, poster, serta pemanfaatan media sosial dan teknologi komunikasi lainnya. Sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi lengkap mengenai tahapan Pilkada, mekanisme pencoblosan, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan.

Pelaksanaan sosialisasi tatap muka dinilai sangat efektif karena memungkinkan interaksi langsung antara petugas KPUD dengan warga, menjawab berbagai pertanyaan, dan mengatasi keraguan masyarakat secara langsung. Selain itu, media alat peraga serta media sosial digunakan untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang aktif di platform digital. Melalui metode kombinasi ini, tingkat kesadaran masyarakat terhadap Pilkada meningkat, terlihat dari antusiasme dan partisipasi yang cukup tinggi dalam pemilihan.

Meski demikian, terdapat sejumlah hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi. Hambatan pertama adalah frekuensi sosialisasi yang dirasakan masih minim, sehingga masyarakat kurang mendapatkan pengulangan informasi yang cukup agar pemahaman mereka benar-benar kuat. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya KPUD dan akses geografis yang sulit menjangkau semua pelosok Pulau Nangka.

Hambatan kedua terkait saluran komunikasi yang masih kurang inklusif. Meskipun media sosial digunakan, tidak semua warga, terutama kelompok lanjut usia dan yang berpendidikan rendah, dapat mengakses atau memahami media digital. Sebagian masyarakat mengandalkan informasi dari pertemuan tatap muka yang jumlahnya terbatas dan masih kurang merata.

Koordinasi antara KPUD dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta Bawaslu juga belum optimal. Kurangnya sinergi ini menyebabkan distribusi informasi dan pengawasan pelaksanaan Pilkada tidak menyeluruh, sehingga ada potensi miskomunikasi dan kurangnya akuntabilitas sosial. Selain itu, faktor sosial budaya seperti tradisi lokal dan

tingkat pendidikan yang bervariasi turut menghambat proses difusi inovasi dalam sosialisasi Pilkada.

Berdasarkan temuan lapangan dan kerangka teori difusi inovasi Rogers, sosialisasi Pilkada belum sepenuhnya melalui tahapan difusi yang ideal, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. KPUD perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi dan memperluas saluran komunikasi yang lebih inklusif serta adaptif terhadap kondisi lokal.

Pemanfaatan agen perubahan lokal seperti tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa harus diperkuat sebagai mediator informasi yang dipercaya masyarakat. Strategi komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik demografis dan sosial budaya masyarakat Pulau Nangka, misalnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media visual yang menarik, dan acara sosialisasi yang bersifat partisipatif.

Selain itu, integrasi antara media konvensional dan digital penting untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pendidikan politik secara kontinu untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap demokrasi dan pentingnya partisipasi pilkada. Sinergi dan koordinasi intensif antar lembaga penyelenggara, pengawas, dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran KPUD Bangka Tengah dalam mensosialisasikan Pilkada Serentak 2024 di Pulau Nangka belum maksimal. Keterbatasan frekuensi, akses komunikasi, dan koordinasi menghambat efektivitas sosialisasi. Diperlukan peningkatan intensitas dan inklusivitas sosialisasi dengan pemanfaatan metode komunikasi yang sesuai kondisi lokal serta integrasi antara media offline dan online. Penguatan sinergi dengan agen perubahan lokal sangat penting sebagai kunci keberhasilan sosialisasi Pilkada yang demokratis dan berkelanjutan di daerah terpencil.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi untuk peningkatan sosialisasi Pilkada di Pulau Nangka dan daerah terpencil lainnya adalah; KPUD Bangka Tengah perlu meningkatkan frekuensi dan kontinuitas sosialisasi serta memperkuat koordinasi dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif; Masyarakat diharapkan lebih aktif mencari informasi resmi dan mengikuti kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan

pemahaman dan partisipasi dalam Pilkada; Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah dan mengkaji efektivitas media sosial serta peran agen perubahan lokal untuk memperkaya strategi sosialisasi.

TENTANG PENULIS

Siti Sara adalah mahasiswa program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Lahir pada 24 Desember 2002 di Sungaiselan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dan menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Muhammadiyah Pangkalpinang. Saat ini, penulis berdomisili di Jalan Fatmawati Kampak (Perumahan Azzahrah Residence), Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Kontak penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik ke Sitisara1123@gmail.com.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahriyah, E. N. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada.
Bouk, (2022). Sosialisasi Politik dan Pendidikan Pemilih.
Caca, (2023). Profesionalisme KPU dalam Pemilu.
Novianty, F., & Octavia, E. (2018). Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik.
Octavia, E., & Anwar, M. (2024). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada.
Rogers, E. M. (1961). Diffusion of Innovations.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.